

ABSTRAK

Penangkapan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil merupakan sebuah tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh TNI, karena TNI bukan bagian dari salah satu sistem peradilan pidana. TNI merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pertahanan negara bukan dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap masyarakat sipil, sehingga apabila TNI melakukan tindakan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil maka profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara patut dipertanyakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu penelitian suatu perkara dengan meninjau bahan pustaka mengenai aturan hukum yang berlaku. Penelitian tersebut dipilih untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneiliti bagaimana bekerjanya hukum di kehidupan masyarakat.

Dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa tindakan penangkapan uang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil tersebut tidak memiliki dasar hukum. Karena tidak memiliki dasar hukum, maka tindakan tersebut tidak sah sehingga cacat hukum yang akan mengakibatkan dilakukannya gugatan praperadilan oleh tersangka yang ditangkap, dengan di ajukannya gugatan praperadilan tersebut apabila kasus tersebut diputus tidak sah oleh pengadilan maka akan dihentikan demi hukum. Dengan dasar tersebut maka tersangka dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi untuk memulihkan hak-hak nya serta martabatnya seperti sediakala.

Kata kunci : Penangkapan oleh TNI terhadap masyarakat sipil – praperadilan – ganti kerugian - rehabilitasi

ABSTRACT

Interception civilian by Indonesian military (TNI) is arbitrary activity, it's mean that Indonesian military is not part of criminal justice. Indonesian military is defense power of country, it's not part of law enforcement, especially to civilian. That's why if Indonesian military take law enforcement it has questionable of professionalism defence power.

Method of this research is normatif, only one case that use Indonesian law regulation. This researched to give real law perception and how it use in civilian society.

Fact of this research that interception by Indonesia military to civilian don't have any law regulation. Because of this, military interception can't be accepted and abuse of justice and will be involved claim action by suspected. It must be stopped. Suspect can assert compensation and rehabilitate his right and dignity.

Keywords : Indonesian military intercept of civilians – praperadilan – compensation - rehabilitation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan	5
1.4. Kegunaan.....	5
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode peneltian.....	6
1.6.1. Jenis Petelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.6.4. Metode Analisis Data	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Tertangkap Tangan	9
2.2. Kewenangan Menangkap Dalam Hal Tertangkap Tangan	14

	2.3. Gugatan Praperadilan	17
BAB III	ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA	21
	3.1. Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh TNI	21
	3.2. Tinjauan Yuridis Tindakan Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh anggota TNI Pada Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana	27
	3.3. Legalitas Penyelidikan Dan Penangkapan Oleh Anggotaa TNI Terhadap Pengguna Narkoba	32
	3.3.1. Dampak Tidak Sahnya Penyelidikan Dan Penangkapan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI	41
	3.3.2. Instansi Penegak Hukum Yang Berwenang Dalam pemberantasan Narkoba	44
	3.3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Tersangka	57
	3.3.3.1 Praperadilan	59
	3.3.3.2 Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.....	64
BAB IV	PENUTUP.....	69
	4.1. Kesimpulan	69
	4.2. Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	73
	BIODATA PENULIS	76